

VOLUME 1, NOMOR 1, JANUARI 2020

p - ISSN : 2715 - 9590

e - ISSN : 2716 - 263X



**LAND** | LOGISTIC AND  
ACCOUNTING  
DEVELOPMENT

JOURNAL



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN  
POLITEKNIK POS INDONESIA



LAND JOURNAL  
DEMI KESEKELUARGAAN

---

**LAND JOURNAL**

**p-ISSN: 2715-9590, e-ISSN: 2716-263X**

**VOLUME 1, NOMOR 1, JANUARI TAHUN 2020 HAL 1 – 107**

---

**PENERBIT**

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan  
Politeknik Pos Indonesia

**PELINDUNG**

Direktur Politeknik Pos Indonesia

Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.

**PENANGGUNG JAWAB**

Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Rima Sundari, SE., M.Ak., AK., CA.

Ketua Redaksi

: Marismiati, SE., M.Si

Dewan Redaksi

1. Dr. Indra Firmansyah, SE., MM., CA.
2. Dewi Selviani Y, SS., M.Pd.
3. Ade Pipit Fatmawati, SE., M.Pd.
4. Jaka Maulana, SE., M.Ak., CA., CPSAK.
5. Rukmi Juwita, SE., M.Si., CA.
6. Khairaningrum M., Spd., M.Pd.

Kesekretariatan

: M. Rizal Satria, SE., M.Ak., CA.

Alamat Redaksi:

Kampus POLITEKNIK POS INDONESIA

Jalan Sariasih No. 54 Bandung 40151

<http://www.d4ak.poltekpos.ac.id>

**LAND JOURNAL**  
**p-ISSN: 2715-9590, e-ISSN: 2716-263X**  
**VOLUME 1 NOMOR 1, BULAN JANUARI 2020**

---

<b>PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</b> Indra Firmansyah, Rani Tarida Sinambela	<b>1</b>
<b>PENGARUH KINERJA KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERTUMBUHAN LABA PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG ASIA AFRIKA BANDUNG</b> Ade Pipit Fatmawati, Andi Tenri Awaru Rala	<b>12</b>
<b>PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL <i>UNDERWRITING</i> TERHADAP LABA PADA PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) PERIODE 2008-2015</b> Rukmi Juwita, Novia Rindiati	<b>21</b>
<b>PENGARUH REALISASI ANGGARAN BIAYA PRODUKSI DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (GPM) PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII</b> Marismiati, Rina Zakiyah	<b>32</b>
<b>PENGARUH PENERAPAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT IRON BIRD (BLUE BIRD GROUP)</b> Khairaningrum Mulyanti, Niken Asyiami Rahma	<b>42</b>
<b>PENGARUH <i>CASH TURNOVER</i> DAN <i>RECEIVABLE TURNOVER</i> TERHADAP <i>RETURN ON ASSET</i> PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII</b> Dewi Selviani, Rahmayani Octarena	<b>54</b>
<b>PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING</b> Rima Sundari, Sri Nengsie Sinaga	<b>65</b>
<b>PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN KAS TERHADAP TINGKAT LIKUIDITAS (<i>QUICK RATIO</i>) PADA PERUSAHAAN KONSTUKSI (STUDI KASUS PT WIJAYA KARYA TBK)</b> Jaka Maulana, Abdul Karim	<b>76</b>
<b>PENGARUH AKTIVA TETAP DAN MODAL KERJA TERHADAP LABA BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN BUMN DIBIDANG PERDAGANGAN (STUDI KASUS PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), PT SARINAH (PERSERO) DAN PERUM BULOG) 2012-2016</b> Muhammad Rizal Satria, Titani An Niza Thamrin	<b>88</b>
<b>PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP LABA SEBELUM PAJAK (STUDI KASUS PADA PD. BUMI BERKAH)</b> Y. Casmadi, Ginardi Rubhani	<b>97</b>

## **PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING**

Rima Sundari, Sri Nengsie Sinaga

[rima.sundari02@gmail.com](mailto:rima.sundari02@gmail.com), [sinagasri97@gmail.com](mailto:sinagasri97@gmail.com)

Politeknik Pos Indonesia

### **ABSTRAK**

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan menjadi system Self Assessment dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam kenyataannya perubahan system ini malah membuat masyarakat cukup banyak melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu penagihan pajak dengan surat paksa dependennya adalah pencairan tunggakan pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan pengambilan data dari laporan rutin penagihan pajak. Metode statistik menggunakan Korelasi *Pearson Product Moment*, Regresi Linear Sederhana, pengujian hipotesis statistik Uji t, dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

**Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak.**

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Upaya tersebut harus dilakukan secara bertahap, terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menjalankan roda pemerintahan, tentunya memerlukan dana anggaran yang cukup besar yang bersumber dari pendapatan negara. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. (Menurut Daliyah: 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, dalam kenyataan masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah :

Sebanyak 2.961 wajib pajak tercatat melakukan [penunggakan pajak](#) sepanjang 2006-2017. Hal tersebut berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ([PPATK](#)). Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, hasil temuan ini telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari temuan

tersebut, sebanyak 2.393 wajib pajak telah ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan utang pajak dengan nilai mencapai Rp 25,9 triliun. "Jadi ada 2.961 wajib pajak yang melakukan tunggakan. Hingga saat ini, sebanyak 2.393 sudah ditanggapi DJP dengan total tunggakan Rp 25,9 triliun," ujar di Kantor [PPATK](#), Jakarta, Selasa (19/12/2017). Menurut dia, dari data wajib pajak ini, telah dilakukan pemblokiran terhadap kepemilikan rekening orang pribadi dan badan. "Ini bagian dari peran PPATK dalam optimalisasi peningkatan penerimaan negara," lanjut dia. Selain itu, jumlah hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi yang telah dikirimkan [PPATK](#) kepada DJP sebanyak 451 laporan. Hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi dengan indikasi tindak pidana perpajakan dan tindak pencucian uang telah menghasilkan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp 2,48 triliun.

Banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk

memaksimalkan pencairan tunggakan pajak. Penagihan pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target pencairan tunggakan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. (Fatrix S : 2017)

Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di atas, penerbitan surat paksa merupakan salah satu cara bagi kantor Pelayanan Pajak dalam

meningkatkan pencairan tunggakan pajak, maka perlu upaya penerbitan surat paksa agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya. Hal ini diharapkan dapat menambah dan mendorong sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri terutama dari sektor pajak untuk membantu kelancaran dalam hal pembangunan. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak dengan judul sebagai berikut **“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying”**.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah peneliti yang dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2018:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Adapun populasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah laporan penagihan (berupa jumlah seluruh penagihan) pada seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sejak berdirinya pada tahun 1994 sampai dengan sekarang. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *nonprobability*

*sampling* dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sugiyono (2018:84) “*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Sugiyono (2018:85) mendefinisikan “*sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying menerbitkan surat paksa kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pada Periode 2014-2018.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying menerima pencairan tunggakan pajak dari Wajib Pajak atas surat paksa yang diterbitkan pada periode 2014-2018.

Sampel dalam penelitian ini adalah data penagihan pajak berupa jumlah penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak bersumber pada laporan rutin penagihan seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying periode 2014-2018 selama lima (5) tahun dengan 60 data laporan penagihan yang diambil perbulan selama 5 periode, yang dimana data tersebut dianggap mampu mewakili populasi dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Korelasi *Product*

#### *Moment*

Menurut (Sugiyono, 2017:228) menyatakan bahwa “teknik korelasi *product moment* digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk *interval* atau *ratio*, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama”. Hasil korelasi *Product Moment* menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap pencairan

tunggakan pajak (Y) sebesar 0,000 hal itu menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y memiliki korelasi. Sementara hubungan antara penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) sebesar 0,984. Maka nilai tersebut berada pada interval koefisien 0,80 – 1,000, yang berarti menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat.

## 2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing berhubungan positif atau negatif. Berikut ini adalah hasil regresi linier sederhana :

$$Y = a + bX$$

$$Y = -131.7357.185,322 + 0,986X$$

Dimana :

Y = Subjek dalam Variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstanta)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Dari persamaan di atas memiliki makna, yaitu :

1. Konstanta sebesar - 131.7357.185,322 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel pencairan tunggakan pajak adalah sebesar - 131.7357.185,322
2. Koefisien regresi X sebesar 0,986 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai penagihan pajak dengan surat paksa, maka nilai pencairan tunggakan pajak bertambah sebesar 0,986. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

## 3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilainya sebesar 0,968. Nilai tersebut sering digunakan untuk menghitung koefisien determinasi (KD), perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= r^2 \times 100\% \\ &= 0,968 \times 100\% \\ &= 96,8\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perolehan  $r^2$  (R square) sebesar 0,968 atau 96,8%, hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar

96,8% sedangkan sisanya sebesar 3,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### 4. Uji t (*t test*)

Uji t atau uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t hitung untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 41,564. Kemudian hasil t tersebut dibandingkan dengan t tabel. Untuk taraf signifikansi 0,05 uji dua pihak dan  $dk = n - k - 1$ ,  $dk = 60 - 1 - 1 = 58$ , maka diperoleh t table = 2,000. Sehingga t hitung 41,564 lebih besar dari t tabel, berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini berarti ada pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

### Pembahasan

#### 1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah penagihan pajak dengan surat paksa KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk periode 2014-2018 menunjukkan nilai yang *fluktuatif*. Dimana pada tahun 2015 dan 2016

penagihan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan yang berarti pada tahun tersebut Wajib Pajak masih banyak yang belum sadar akan utang pajaknya dibanding tahun 2017 dan 2018. Hal tersebut menggambarkan bahwa kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau utang pajaknya, terlihat dari jumlah penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan kepada wajib pajak setiap tahunnya. Dalam hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak melakukan serangkaian tindakan, diantaranya adalah dengan :

- Banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengerti mengenai aturan dalam proses penagihan pajak,
- Banyaknya Wajib Pajak yang sedang mengajukan keberatan,
- Wajib Pajak tidak mempunyai

kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan

## **2. Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pencairan tunggakan pajak yang diterima oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk periode tahun 2014-2018 menunjukkan nilai yang *fluktuatif*. Dimana pada tahun 2015 dan 2016 pencairan tunggakan pajak mengalami peningkatan yang berarti pelunasan utang pajak lebih maksimal dibanding tahun 2017 dan 2018. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam melunasi kewajiban perpajakannya atau utang pajaknya, terlihat dari jumlah pencairan tunggakan pajak setelah diterbitkannya surat paksa kepada wajib pajak setiap tahunnya.

## **3. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan**

### **Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying**

Uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis secara parsial uji  $t$  yaitu nilai  $t$  hitung 41,564 lebih besar dari  $t$  tabel 2,000, yang artinya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga, hasil pengujian ini menerima hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Hasil korelasi yang dilakukan pun menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) sebesar 0,000 hal itu menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variable X dan Y memiliki korelasi. Sementara hubungan antara penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) sebesar 0,984. Maka nilai tersebut berada pada interval koefisien 0,80 – 1,000, yang

berarti menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat. Dengan menggunakan uji analisis koefisien determinasi menunjukkan  $r^2$  (r Square) sebesar 0,968 atau 96,8%, hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa (X) memberikan pengaruh 96,8% terhadap pencairan tunggakan pajak (Y). Sedangkan sisanya sebesar 3,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Dita Tiana (2018) dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung).

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini yaitu “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying” maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bandung Cibeunying menunjukkan nilai yang *fluktuatif*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau utang pajaknya.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying menunjukkan nilai yang *fluktuatif*. Hal tersebut menunjukkan masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dan sadar akan utang pajaknya, terlihat dari jumlah pencairan tunggakan pajak setelah diterbitkannya surat paksa kepada wajib pajak setiap tahunnya.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan

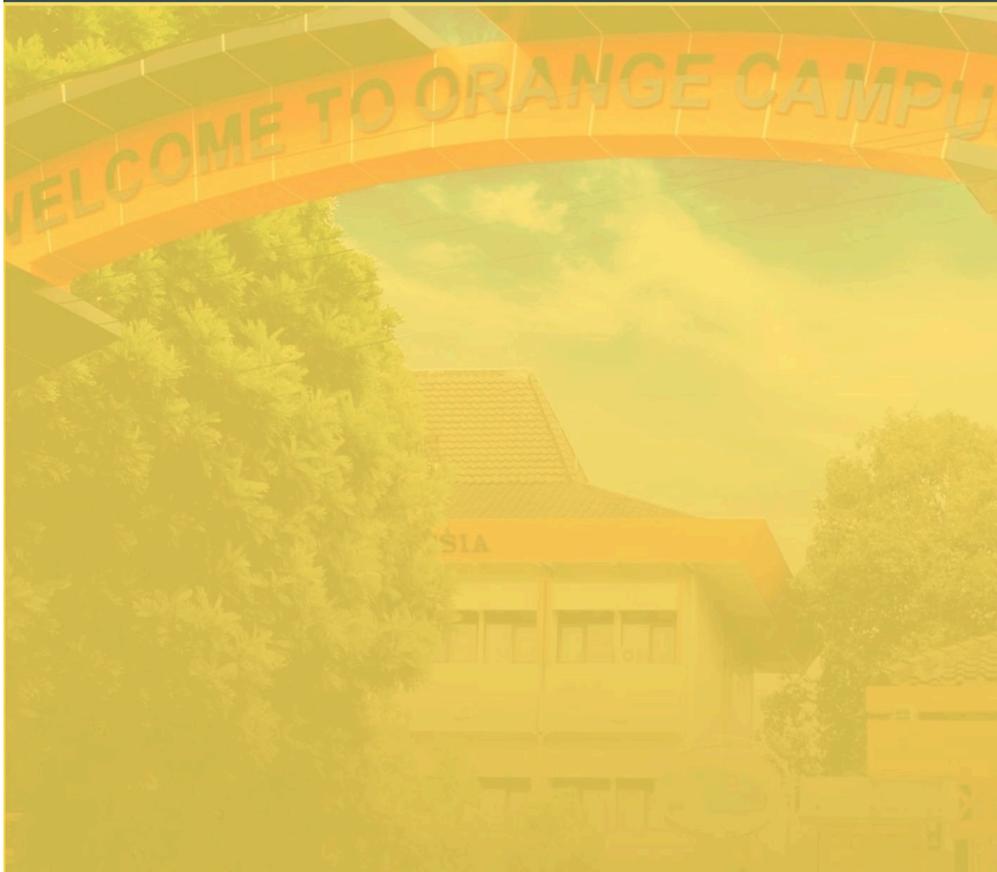
terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP ratama Bandung Cibeunying.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Nur. (2013). Pemeriksaan Pajak Menghindari dan Menghadapi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Indopos.Co.Id, 20 September 2018.
- Liputan6.com, 19 Des 2017.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2013. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 tentang tata cara dan waktu penagihan pajak.
- Nuryaman dan Veronica Christina. (2015). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Priantara, Diaz. (2012). Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prof. Dr. H Rochmat Soemitri, S.H. (2007). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung : Eresco.
- Resmi Siti, (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi Siti, (2017). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Syofian. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Thomas Sumarsan. (2013). Perpajakan Indonesia (Vo.3). Jakarta: PT. Indeks.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [www.ortax.org](http://www.ortax.org)

LAND JOURNAL  
VOLUME 1, NOMOR 1, JANUARI 2020



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN  
POLITEKNIK POS INDONESIA

p-ISSN: 2715-9590



e-ISSN: 2716-263X

